



Membedah Diskursus Sinodalitas Paus Fransiskus dan Relevansinya terhadap Kehidupan Menggereja di Indonesia

Rikardus Jehaut

Sekolah Tinggi Pastoral St. Sirilus Ruteng 86517, Flores, NTT
Pos-el: ardujehaut091073@gmail.com

Diajukan: 26-04-2022; Direview: 03-06-2022; Diterima: 08-06-2022; Dipublis: 25-06-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.31385/jl.v21i1.284.105-120>

Abstract: This article intends to critically dissect Pope Francis' discourse on synodality at the commemoration of the 50th anniversary of the institution of the Synod of Bishops on 17 October 2015. First of all, it tackles the concept of synodality briefly and then elaborate on the various aspects of synodality. By using the method of content analysis and literature study, the author - in the light of Pope Francis' discourse - seeks to provide some critical notes on what the spirit and practice of synodality does means and does not mean. The novelty of this article lies in its attempt to see the relevance of the discourse for the Indonesian context. The author argues that the themes of clericalism, democratization in the Church, the development of civil society based on justice and brotherhood, dialogue between religions are relevant for our context. The author concludes that a correct understanding of synodality as a constitutive dimension of the Church must be possessed by all the faithful because it greatly determines the existence and the life of the Church as well as Her mission in the world.

Key words: Diskursus, sinodalitas, Paus Fransiskus, Gereja, Konteks Indonesia

Pendahuluan

Dalam Himbauan Apostolik *Evangelii Gaudium*, Paus Fransiskus menegaskan kembali ajaran Konsili Vatikan II tentang pertobatan gerejawi sebagai keterbukaan terhadap pembaruan diri terus menerus yang lahir dari kesetiaan kepada Yesus Kristus¹. Ruang lingkup pertobatan ini mencakup semua aspek kehidupan menggereja, termasuk pembaruan pemahaman tentang Gereja itu sendiri. Dalam wawancaranya dengan Antonio Spadaro, redaktur jurnal *La Civiltà Cattolica*, ia berbicara tentang hakekat Gereja sebagai Umat Allah, yang di dalamnya terdiri dari para gembala dan umat beriman. Gereja adalah totalitas Umat Allah². Sebagai umat Allah, Gereja yang sedang berziarah di tengah dunia senantiasa berjalan bersama, ber-sinodal. Sinodalitas menjadi bagian yang menyatu dengan eksistensi Gereja.

Gagasan cemerlangnya tentang sinodalitas ia gaungkan dalam diskursus 17 Oktober 2015 pada saat peringatan 50 tahun pembentukan Sinode para Uskup³. Keseluruhan deskripsi argumentatifnya – yang sangat kental dengan aroma teologis dan pastoral serta merupakan hasil dari sebuah pergumulan reflektif yang mendalam – bermuara pada upaya untuk menegaskan kembali hakekat dan keberadaan Gereja di tengah dunia. Gereja adalah sinodalitas. Sinodalitas merupakan

¹ Papa Francesco, Esortazione Apostolica *Evangelii Gaudium*, n. 26 (Città del Vaticano/Milano: Libreria Editrice Vaticana/Edizione San Paolo, 2013): 55.

² Antonio Spadaro, "Intervista a Papa Francesco," *La Civiltà Cattolica* 164, no. 3 (2013): 459.

³ Papa Francesco, "Discorso in Occasione Della Commemorazione Del 50.Mo Anniversario Dell'Istituzione Del Sinodo Dei Vescovi," *Acta Apostolicae Sedis* 107, no. 11 (2015): 1138–1144.

elemen konstitutif Gereja. Sinodalitas, yang merupakan sifat dasar Gereja, harus dialami pada semua tingkat dan dimensi kehidupan Gereja. Begitu pentingnya sinodalitas dalam Gereja juga menjadi alasan mengapa ia sangat antusias pada saat membuka Sinode Para Uskup - yang mengusung tema “Untuk Gereja Sinodal: *Communio*, Partisipasi dan Misi” – dalam perayaan Ekaristi pada tanggal 10 Oktober 2021⁴ dan yang puncaknya dirayakan pada bulan Oktober 2023. Diskursus pada peringatan 50 tahun pembentukan Sinode para Uskup tersebut menggulirkan butir-butir pemikiran yang menarik sekaligus memantik kesadaran.

Dengan menggunakan metode analisis isi dan studi kepustakaan, penulis bermaksud untuk membedah pemikiran Paus Fransiskus dalam diskursusnya tersebut dengan pisau yuridis-teologis. Harus diakui bahwa beberapa penulis sebelumnya telah menelaah tema tentang sinodalitas dengan sudut pandang dan penekanan tertentu. John Renken, misalnya, memfokuskan perhatiannya pada elemen konstitutif sinodalitas dan mempertautkannya dengan keberadaan Gereja di tengah dunia⁵. Sementara itu, Eamon Fitzgibbon secara umum menyoroti sinodalitas dan implikasinya terhadap keseluruhan aspek kehidupan Gereja dan menyimpulkan bahwa sinodalitas adalah kerangka penafsiran yang terbaik untuk memahami kepemimpinan Paus Fransiskus⁶. Dari lain pihak, Christophe Pierre, menggarisbawahi panggilan Gereja untuk menghayati iman secara sinodal melalui perjalanan bersama menuju Kristus dalam pusran waktu dengan tujuan evangelisasi. Sinodalitas memiliki landasan trinitarian, kristologis, dan pneumatologi-mariologis. Dalam praktiknya, hal tersebut melibatkan sebuah spiritualitas penegasan Roh yang diekspresikan dalam sikap memahami, menafsir dan memilih, dan hal ini merupakan tanggung jawab bersama umat beriman pada semua level kehidupan menggereja⁷.

Tulisan ini memiliki kebaruan dalam hal dua hal, yakni pertama, fokus perhatian diarahkan pada tema diskursus Paus Fransiskus pada tanggal 17 Oktober 2015 menyangkut sinodalitas dan pelbagai aspeknya; kedua, menarik relevansinya untuk konteks kehidupan menggereja di Indonesia. Rumusan masalah yang hendak dibahas adalah manakah aspek-aspek sinodalitas yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam diskursusnya tersebut? Hal-hal apa saja yang bukan dan yang merupakan pemahaman yang benar tentang sinodalitas? Apakah relevansinya untuk konteks Indonesia? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan kajian ini adalah mendeskripsikan pelbagai aspek sinodalitas dan secara kritis berusaha untuk mencermati hal-hal yang bukan dan yang merupakan pemahaman yang benar tentang sinodalitas. Selain itu, mendeskripsikan pelbagai hal yang relevan untuk konteks kehidupan menggereja di Indonesia.

Sinodalitas

Sinode adalah sebuah kata kuno yang berhubungan dengan tradisi Gereja. Secara etimologis kata yang berasal dari kata bahasa Yunani ini, yang dibentuk dari preposisi *syn*, yang berarti “dengan”, dan kata benda *hodos* yang berarti “jalan”. Istilah Yunani *synodos* diterjemahkan ke dalam bahasa

⁴ Papa Francesco, “Celebrazione Dell’eucaristia per l’apertura Del Sinodo Sulla Sinodalita. Omelia Del Santo Padre Francesco,” <https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html>, 2021.

⁵ John Renken, “Synodality: A Constitutive Element of the Church. Reflection on Pope Francis and Synodality,” *Studia Canonica* 52, no. 1 (2018): 5–44.

⁶ Eamon Fitzgibbon, “Together on the Way - Pope Francis and Synodality,” *The Furrow* 68, no. 10 (2017): 532–539.

⁷ Christophe Pierre, “Synodality and Pope Francis: The Church That Walks Together,” *The Jurist* 77, no. 1 (2021): 3–23.

Latin dengan *synodus* atau *concilium*, yang dalam penggunaan profan merujuk pada pertemuan yang diselenggarakan oleh otoritas yang sah. Dalam beberapa dekade terakhir telah digunakan kata benda dan Komisi Teologi Internasional mengartikannya sebagai sinodalitas. Dalam eklesiologi Umat Allah dari Konsili Vatikan II, istilah sinodalitas merujuk pada cara hidup dan cara bertindak (*modus vivendi et operandi*) Gereja sebagai Umat Allah yang memmanifestasikan dan merealisasikan secara konkret persekutuanannya dengan berjalan bersama, berkumpul bersama dan dengan berpartisipasi secara aktif secara bersama-sama dalam misi evangelisasi⁸.

Jika dibahasakan secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa sinodalitas mengacu pada proses perjalanan bersama umat beriman di dunia ini - dalam keragaman anggotanya dan dalam pelaksanaan yang bertanggung jawab dan konvergen dari berbagai karisma dan pelayanan dalam Gereja demi kebaikan bersama - menuju Kerajaan Abadi di bawah bimbingan Tuhan yang bangkit. Kerajaan Abadi ini sudah tercermin, walaupun tidak sempurna, dalam proses perjalanan bersama tersebut.

Aspek-aspek Sinodalitas

Dalam kata pengantar diskursusnya Paus Fransiskus menegaskan bahwa sejak Konsili Vatikan II kita telah mengalami semakin intensnya kebutuhan dan keindahan ‘perjalanan bersama’ sebagai Umat Allah. Selanjutnya, beliau menitik lebih dalam dengan menguraikan pelbagai aspek penting sinodalitas. Untuk memudahkan pembaca dalam “mengunyah” diskursus tersebut, penulis berusaha untuk mengatak-atiknya dengan memberikan penomoran sebagai berikut:

Pertama, sinodalitas adalah elemen konstitutif Gereja. Elemen konstitutif adalah sesuatu yang hakiki yang sedemikian menentukan terciptanya atau terbentuknya sesuatu, sehingga jika elemen tersebut tidak ada, sesuatu itu tidak tercipta atau tidak ada. Sebagai elemen konstitutif, sinodalitas menentukan terciptanya atau terbentuknya Gereja. Dengan kata lain, tanpa elemen ini, Gereja tidak tercipta atau tidak ada. Gereja identik dengan sinodalitas di mana setiap orang berjalan bersama. Sinodalitas menyediakan kerangka penafsiran yang sangat cocok untuk memahami pelayanan hirarkial itu sendiri. Di dalam Gereja, tidak seorang pun dapat diangkat lebih tinggi dari yang lain. Sebaliknya, pelayanan tersebut melibatkan penurunan diri untuk melayani sesama yang lain sepanjang ziarah hidup menggereja itu sendiri⁹.

Kedua, sinodalitas menyingkapkan otoritas para pelayan atau gembala melalui pelayanan dan kuasa sebagai kuasa salib. Gereja sinodal identik dengan piramida terbalik di mana bagian atas berada di bawah dasarnya. Otoritas yang dimiliki para pelayan dalam Gereja selalu dilihat dalam konteks pelayanan (*the authority of service*) dan kuasa dihubungkan dengan kuasa salib (*the power of the cross*). Paus Fransiskus menjelaskan bahwa Yesus Kristus mendirikan Gereja dengan menempatkan Kolegium para Uskup pada bagian atasnya, namun dalam Gereja, sebagaimana dalam piramida terbalik, yang di atas berada di bagian dasar. Sebagai konsekuensinya, mereka yang menjalankan kuasa disebut pelayan sebab dalam arti yang asli dari kata ini, mereka adalah yang terakhir dari semua. Bagi murid-murid Yesus, kemarin, hari ini dan selalu, otoritas satu-satunya adalah otoritas pelayanan

⁸ Commissione Teologia Internazionale, “La Sinodalita Nella Vita e Nella Missione Della Chiesa,” nn. 5-6 https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_it.html, 2018.

⁹ Papa Francesco, “Discorso in Occasione Della Commemorazione Del 50.Mo Anniversario Dell’Istituzione Del Sinodo Dei Vescovi”: 1141.

dan kuasa satu-satunya adalah kuasa salib.¹⁰ Jika piramida tidak berbentuk terbalik, maka tidak ada sinodalitas di dalam Gereja. Dalam wawancaranya dengan *Tertio*, sebuah surat kabar mingguan Katolik Belgia, pada akhir Tahun Yubelium Belas Kasih, Paus Fransiskus membandingkan Gereja piramidal dan Gereja sinodal:

*Do not descend from high to low, but listen to the Churches, harmonise them, discern. And so there is a post-Synodal exhortation, which is Amoris Laetitia, which is the result of two Synods, in which all the Church worked, and which the Pope made his own. It is expressed in a harmonious way. It is interesting that all that it contains (Amoris Laetitia), in the Synod it was approved by more than two thirds of the fathers. And this is a guarantee. A synodal Church means that there is this movement from high to low, high to love. And the same in the dioceses.*¹¹

Ketiga, sinodalitas melibatkan seluruh Umat Allah. Paus Fransiskus mengakui bahwa seluruh Gereja berpartisipasi dalam proses sinodalitas. Dengan mengutip *Lumen Gentium* 12, beliau menegaskan bahwa semua yang dibaptis telah diurapi dan tidak dapat salah dalam beriman. Cita rasa iman adikodrati (*sensus fidei*) mencegah pemisahan yang kaku antara Gereja yang mengajar (*Ecclesia docens*) dan Gereja yang belajar (*Ecclesia discens*). Karakter tidak dapat salah dalam beriman diperlihatkan dalam cita rasa iman adikodrati tersebut yang dimiliki oleh semua umat beriman. Hal ini terlihat ketika mulai dari Uskup hingga kaum beriman awam yang terkecil secara keseluruhan menyatakan kesepakatan mereka tentang perkara-perkara iman dan kesusilaan. Sebab di bawah bimbingan wewenang mengajar yang suci, yang dipatuhinya dengan setia, Umat Allah sudah tidak menerima perkataan manusia lagi, melainkan menerima sabda Allah. Hal inilah yang dikenal dengan istilah ‘ketidaksesatan dalam beriman’ (*infallibilitas in credendo*)¹².

Keempat, sinodalitas menuntut sikap saling mendengarkan. Sikap ini tentu saja lebih dari *sekadar* mendengar. Paus Fransiskus mengingatkan bahwa Gereja sinodal adalah Gereja yang mendengarkan di mana masing-masing orang dapat saling belajar. Umat awam, Kolegium para Uskup, Uskup Roma semuanya harus saling mendengarkan satu sama lain dan mendengarkan bisikan Roh Kudus supaya mereka dapat mengetahui apa yang dikatakannya kepada Gereja¹³.

Kelima, sinodalitas adalah sebuah konsep yang gampang untuk dikatakan, tetapi tidak begitu mudah untuk diimplementasikan. Bapa Suci menyatakan bahwa Tuhan mengundang umat-Ny kepada sinodalitas, tetapi di lain pihak, beliau juga mengakui bahwa mempraktikkan sinodalitas dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah tantangan tersendiri¹⁴.

Keenam, sinodalitas terdapat pada semua level kehidupan menggereja. Paus Fransiskus menjelaskan bahwa dalam Gereja sinodal, Sinode para Uskup hanyalah manifestasi dari dinamisme persekutuan yang mengilhami semua keputusan gerejawi. Selain itu, pelaksanaan sinodalitas dapat juga ditemukan pada semua level kehidupan menggereja, entah lokal, regional maupun universal.

Pada level lokal, sinodalitas ditemukan dalam organ-organ persekutuan Gereja Partikular. Paus Fransiskus menggarisbawahi apa yang dinyatakan secara eksplisit dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 terkait sinode diosesan di mana para imam dan kaum awam dipanggil untuk bekerjasama dengan Uskup Diosesan demi kebaikan seluruh komunitas umat beriman. Selain itu juga disinggung tentang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1142.

¹¹ Belgian Catholic Weekly, “Interview with the Holy Father Francis for the Belgian Catholic Weekly, ‘Tertio’,” *Tertio*, 2016, <https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/12/07/161207a.html>.

¹² Francesco, “Discorso in Occasione Della Commemorazione Del 50.Mo Anniversario Dell’Istituzione Del Sinodo Dei Vescovi”: 1140

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1139

keberadaan organ-organ persekutuan, seperti dewan imam, dewan konsultores, dewan pastoral. Agar efektif, organ-organ ini harus tetap terhubung ke akar rumput, ke “dasar”. Warna Gereja sinodal akan kelihatan jika organ-organ persekutuan ini tetap mempertahankan hubungan dengan “dasar” dan bergerak mulai dari umat beriman itu sendiri dengan berbagai persoalan keseharian yang mereka hadapi sekalipun mungkin terkadang melelahkan, namun harus dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk saling mendengarkan dan berbagi¹⁵.

Sinodalitas juga ditemukan pada level provinsi gerejawi dan regio gerejawi, konsili-konsili partikular, dan secara khusus Konferensi Para Uskup. Paus Fransiskus mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana mewujudkan lebih baik, melalui pelbagai institusi ini, hal-hal yang berhubungan dengan kolegialitas, misalnya dengan mengintegrasikan dan memperbarui aspek-aspek tertentu dari organisasi gerejawi yang lama. Harapan yang diungkapkan oleh Konsili Vatikan II menyangkut keberadaan institusi-institusi tersebut untuk membantu meningkatkan semangat kolegialitas episkopal belum sepenuhnya terwujud. Sebagai Gereja, kita masih dalam perjalanan yang panjang menuju kepada pemenuhan hal tersebut. Bapa Suci menegaskan bahwa dalam Gereja sinodal tidak dianjurkan seorang Paus menggantikan peran para Uskup Diosesan dalam melakukan *discernment* terhadap setiap masalah yang muncul di wilayah mereka. Dalam hal ini, apa yang paling penting adalah mempromosikan semangat desentralisasi yang sehat¹⁶.

Pada level berikutnya, sinodalitas dalam konteks Gereja universal. Di sini Sinode Para Uskup, yang merupakan himpunan para Uskup yang dipilih dari pelbagai kawasan dunia, menjadi sebuah kolegialitas episkopal dengan Gereja sinodal secara keseluruhan. Level universal ini memanasifestasikan kolegialitas dan semangat sinodal dalam ikatan persaudaraan yang dapat menjadi efektif dalam situasi-situasi tertentu, menggabungkan para Uskup dengan Paus sebagai wujud kepedulian terhadap Umat Allah¹⁷.

Ketujuh, sinodalitas memiliki implikasi ekumenis yang signifikan. Paus Fransiskus percaya bahwa pengkajian yang cermat terhadap sinodalitas akan memberikan sumbangan positif bagi hubungan ekumenis dengan Gereja Ortodoks. Pengkajian ini berhubungan dengan pertanyaan bagaimana prinsip sinodalitas dan pelayanan seorang pemimpin diartikulasikan sekian dalam kehidupan menggereja sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan hubungan di antara Gereja-Gereja. Menurut beliau umat Katolik dapat belajar dari Gereja Ortodoks dalam hal implementasi sinodalitas pada tataran praksis keseharian¹⁸.

Kedelapan, sinodalitas dapat memberikan wawasan kepada pelayanan Paus sebagai pengganti Rasul Petrus. Paus Fransiskus berkeyakinan bahwa dalam Gereja sinodal terang yang lebih besar dapat menyinari pelayanannya sebagai pimpinan tertinggi Gereja Universal. Beliau menyadari bahwa ia tidak berada “di atas”, melainkan “di dalam” Gereja sebagai bagian dari umat Allah yang dibaptis dan di dalam Kolegium para Uskup sebagai Uskup di antara para Uskup, dan yang pada saat yang sama dipanggil untuk memimpin Gereja Roma dalam kasih atas semua Gereja. Beliau mengafirmasi kembali kebutuhan akan pentingnya memikirkan ‘pertobatan kepausan’, dan di lain pihak, menggarisbawahi kata-kata pendahulunya Paus Yohanes Paulus II bahwa sebagai Uskup Roma beliau sepenuhnya sadar bahwa Kristus sangat menginginkan persekutuan yang penuh dan kelihatan dari semua komunitas yang di dalamnya Roh Allah bersemayam sambil mengakui aspirasi ekumenis

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1143

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 1143-1144

dari mayoritas komunitas kristiani, menemukan cara untuk melaksanakannya dengan tetap terbuka terhadap situasi baru tanpa mengabaikan apa yang penting untuk misi Gereja¹⁹.

Kesembilan, sinodalitas dapat membantu pembangunan masyarakat madani yang didasarkan atas keadilan dan persaudaraan. Dalam refleksinya, Bapa Suci menyatakan bahwa Gereja sinodal, yang melibatkan sebuah penemuan kembali martabat manusia dan pemahaman bahwa otoritas adalah pelayanan, dapat membantu dalam upaya untuk mereformasi tatanan sipil demi terciptanya sebuah masyarakat yang lebih adil. Beliau mengatakan bahwa perhatian kita juga menjangkau kemanusiaan secara keseluruhan. Gereja sinodal adalah seperti sebuah ukuran yang ditempatkan di antara bangsa-bangsa di tengah dunia yang – sekalipun mengusung nilai partisipasi, solidaritas dan transparansi dalam bidang administrasi publik – seringkali menyerahkan nasib seluruh anggota masyarakat pada sekelompok kecil orang yang kuat dan berpengaruh. Sebagai Gereja yang “berjalan bersama”, yang berbagi penderitaan sejarah, kita perlu menghargai mimpi bahwa penemuan kembali martabat bangsa-bangsa yang tidak dapat diganggu gugat dan fungsi otoritas sebagai pelayanan juga dapat membantu pembangunan masyarakat madani yang didasarkan atas keadilan dan persaudaraan. Mimpi besar seperti inilah yang akan membawa dunia yang lebih indah dan manusiawi untuk generasi mendatang²⁰.

Kesepuluh, sinodalitas bukanlah sebuah pilihan bagi Gereja. Menurut Paus Fransiskus kita harus melanjutkan jalan sinodal ini. Dunia tempat kita hidup dan di dalamnya kita dipanggil untuk mencintai dan melayani, bahkan dengan kontradiksinya, menuntut agar Gereja memperkuat kerja sama di semua bidang yang menjadi misinya. Justru jalan sinodalitas inilah yang diharapkan Allah dari Gereja milenium ketiga²¹.

Catatan Kritis

Pemikiran Paus Fransiskus sebagaimana tertuang dalam diskursusnya di atas membantu kita untuk memahami hal-hal yang tidak bersesuaian dengan sinodalitas dan hal-hal yang sesungguhnya menjadi bagian dari pemahaman yang benar tentang sinodalitas. Catatan berikut ini merupakan pencermatan kritis tentang hal-hal tersebut.

Pertama, sinodalitas tidak berarti bahwa para pemimpin Gereja kehilangan otoritas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pastoral bagi Umat Allah. Semangat dan praktik sinodalitas tetap memberi ruang bagi para pemimpin Gereja untuk menjalankan otoritasnya dengan kesadaran yang diperbarui dalam melayani umat Allah dalam semangat Yesus Gembala Baik yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Sinodalitas mendorong para pemimpin untuk lebih memperhatikan tantangan kenabian Paus Fransiskus untuk menjadi “gembala berbau domba”²² sebagaimana diperlihatkan Yesus sendiri melalui penjelmaan-Nya menjadi Emanuel, Allah beserta kita. Sinodalitas mempromosikan identifikasi radikal para pemimpin Gereja dengan sikap dan cara hidup Yesus sendiri. Sebagaimana Yesus selalu berada dekat domba-domba-Nya, mengenal mereka satu per satu, mengetahui kebutuhan mereka, demikian pun para pemimpin yang menjadi

¹⁹ *Ibid.*, hlm.1144

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 1139

²² Papa Francesco, *Con l'odore Delle Pecore – Incontri Con i Sacerdoti* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016): 115-117.

gembala umat harus menghayati cara hidup dan cara bertindak yang sama dalam semangat kerendahan hati²³.

Kedua, sinodalitas tidak berarti bahwa Gereja mengusung paham demokrasi sebagaimana dimengerti dalam konteks politik sekular. Semangat dan praktik sinodalitas tidak menciptakan semacam “demokratisasi” Gereja, yang memberi tempat bagi suara terbanyak, melainkan memungkinkan pembagian yang tepat dari beragam karunia Roh demi kebaikan semua orang²⁴. Sinodalitas tetap mempertahankan sifat hirarkis Gereja dengan menekankan bahwa seluruh Umat Allah “berjalan bersama” dan berbagi karunia Roh selama perjalanan tersebut. Setiap anggota dicurahi dengan karunia Roh yang unik untuk membangun persekutuan hidup bersama dalam semangat saling berbagai, saling melengkapi dan saling memperkaya. Penting untuk disadari bahwa berbagai karunia yang berbeda tersebut tidak mengabaikan prinsip fundamental menyangkut kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan dari semua orang beriman kristiani sesuai dengan kedudukan khas dan tugas masing-masing dalam membangun Tubuh Kristus²⁵. Di lain pihak, kesetaraan mendasar setiap anggota Gereja juga tidak menyiratkan bahwa setiap anggota memiliki karunia yang identik mengingat bahwa sebagian anggota dipanggil untuk pelayanan kepemimpinan yang dalam konteks hidup menggereja disebut gembala, guru, penatua, uskup, imam dan sebagainya²⁶.

Ketiga, sinodalitas tidak berarti bahwa pelbagai struktur sinodalitas *harus* memiliki suara deliberatif atau konsensual, bukan suara konsultatif. Semangat dan praktik sinodalitas tidak berarti bahwa struktur sinodalitas harus selalu menggunakan suara deliberatif atau konsensual dalam menjalankan fungsinya. Dalam kenyataannya, struktur sinodalitas seringkali memberikan suara konsultatif kepada pemimpin Gereja atau otoritas gerejawi yang berwenang. Suara konsultatif ini tentu saja harus mendapat perhatian yang serius dari pemimpin Gereja dengan mempertimbangkan kebaikan seluruh komunitas, dan persatuan antara komunitas dan seluruh Gereja. Jika pemimpin tidak menerima saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh struktur sinodalitas, maka ia harus menjelaskan secara transparan alasan penolakannya²⁷.

Hal mendasar bagi setiap struktur sinodalitas adalah bahwa para anggotanya berdialog. Sesuai dengan ketentuan normatif, dialog tersebut dapat menghasilkan keputusan tertentu melalui pemungutan suara deliberatif, konsensual dan konsultatif. Pemungutan suara deliberatif misalnya dalam hubungan dengan pemilihan administrator keuskupan oleh kolegium konsultor pada saat tahta lowong. Pemungutan suara konsensual, di lain pihak, berhubungan dengan persetujuan yang diberikan kepada otoritas gerejawi sebelum mengambil tindakan tertentu secara sah. Pemungutan suara konsultatif berhubungan dengan rekomendasi yang ditawarkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan tidak bersifat mengikat, dalam arti bahwa otoritas tersebut bebas menerima atau menolak rekomendasi tersebut²⁸.

²³ Diego Fares, *Il Profumo Del Pastore: Il Vescovo Nelle Visione Di Papa Francesco* (Milano: Ancora Editrice, 2015): 5-7.

²⁴ Joseph Ratzinger, “Democratizzazione Della Chiesa?,” in *Democrazia Nella Chiesa. Possibilità e Limiti*, ed. Ratzinger, Joseph & Maier, Hans (Brescia: Queriniana, 2005): 51.

²⁵ Giacomo Incitti, *Il Popolo Di Dio. La Struttura Giuridica Fondamentale Tra Ugualianza e Diversita* (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007): 29-34.

²⁶ Dario Vitale, “Sacerdozio Comune e Sacerdozio Ministeriale o Gerarchico. Rilettura Di Una Questione Controversa,” *Rassegna Di Teologia* 52, no. 1 (2011): 48.

²⁷ Aldo Girauda, “I Processi Consultivi e Deliberativi Nella Chiesa,” *Quaderni Di Diritto Ecclesiale* 34 (2021): 161–180.

²⁸ Alphonse Borrás, “Soltanto Consultivo? Sul Valore Del Consigliare Nella Chiesa,” *La Rivista Del Clero Italiano* 5 (2016): 377–97.

Keempat, sinodalitas tidak berarti bahwa struktur-struktur baru harus dibentuk di dalam Gereja supaya sinodalitas dapat dialami oleh umat beriman. Secara internal, Gereja sesungguhnya telah memiliki banyak struktur yang memberikan ruang bagi pertumbuhan dan perkembangan sinodalitas. Jika kita merefleksikan lebih mendalam tentang sinodalitas dan berkomitmen untuk menenunnya ke dalam tatanan kehidupan gerejawi sehari-hari, tampaknya tepat bahwa secara kolektif organ-organ persekutuan ini disebut sebagai “struktur-struktur sinodalitas”. Istilah kolektif ini memiliki keunggulan tersendiri dalam menggarisbawahi pentingnya perwujudan sinodalitas dari masing-masing struktur gerejawi ini dalam pelbagai kegiatan konkret.

Setiap struktur sinodalitas memiliki tujuan yang berbeda atau unik di dalam Gereja Partikular. Hal ini harus dipahami dengan baik demi menghindari terjadinya kebingungan. Misalnya, keberadaan sinode diosesan (yang terdiri dari para klerus dan orang-orang beriman kristiani yang terpilih dari Gereja partikular) adalah untuk menawarkan bantuan kepada Uskup Diosesan demi kebaikan seluruh komunitas diosesan; dewan presbiteral sebagai senat Uskup (yang terdiri dari para imam yang mewakili *presbyterium*) bertugas untuk membantu Uskup dalam pemerintahan keuskupan menurut norma hukum demi kebaikan pastoral dari umat Allah; kolegium konsultor membantu Uskup Diosesan dalam menjalankan pelbagai tugas yang ditentukan hukum, termasuk pada saat di mana tahta keuskupan terhalang (*sede impedita*) atau lowong (*sede vacante*); dewan pastoral keuskupan atau paroki dibentuk untuk membantu Uskup dalam hal perencanaan pastoral, yakni untuk menginvestasikan, mempertimbangkan dan mengusulkan kesimpulan praktis terkait kebutuhan pastoral.

Tantangan yang barangkali perlu disikapi secara serius oleh para pemimpin Gereja dan mereka yang berada dalam struktur sinodalitas adalah bagaimana menggabungkan semangat dan praktik sinodalitas ke dalam struktur yang ada. Paus Fransiskus sendiri menyadari tantangan ini dengan mengatakan bahwa perjalanan bersama adalah sebuah konsep yang mudah untuk diungkapkan dengan kata-kata, namun tidak begitu mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari²⁹. Menerapkan sinodalitas ke dalam praktik mengandaikan adanya pemahaman yang akurat tentang gagasan sinodalitas yang melibatkan penegasan bersama, rasa hormat, dan keyakinan iman akan karunia Roh yang beragam tetapi saling melengkapi, dan barangkali yang terpenting adalah saling mendengarkan dengan sikap terbuka. Sinodalitas adalah cara hidup dan cara bertindak Gereja, entah itu melalui struktur yang sudah ada saat ini maupun dengan struktur yang berbeda di masa depan³⁰.

Kelima, sinodalitas berarti bahwa semua anggota Gereja mengakui pelbagai karunia Roh dan membagikannya dengan murah hati. Sesungguhnya, semangat dan praktik sinodalitas mengakui bahwa semua anggota Gereja percaya bahwa Roh memberikan karunia kepada setiap anggota Umat Allah dan bahwa setiap anggota diharapkan untuk membagikan karunia tersebut demi kebaikan bersama dan demi memajukan misi Gereja³¹. Pengakuan akan adanya karunia Roh yang beragam dan saling melengkapi akan memberikan dampak positif terhadap partisipasi yang lebih luas dari semua umat beriman dalam kehidupan dan misi Gereja. Karunia-karunia Roh yang berbeda dipercayakan kepada semua anggota Gereja, dan tidak hanya kepada sekelompok orang saja³². Kesadaran akan hal

²⁹ Mauro Faggioli, “From Collegiality to Synodality: Promise and Limits of Francis’s “Listening Primacy,” *Irish Theological Quarterly* 85 (2020): 352–369.

³⁰ Matteo Brunini, “In Cammino Verso La Sinodalità Ecclesiale Sospinti Da Papa Francesco,” *Rassegna Di Teologia* 59, no. 3 (2018): 419–440.

³¹ Antonio Spadaro & Carlo Galli, “La Sinodalità Nella Vita e Nella Missione Della Chiesa,” *La Civiltà Cattolica* 4039, no. 4 (2018): 55–70.

³² Agostino Porreca, “La Teologia Del Popolo Radici Teologiche Di Papa Francesco,” *Rassegna Di Teologia* 61, no. 2 (2020): 349–51.

ini penting demi memperkuat kesaksian missioner Gereja sekaligus mendorong semua umat beriman untuk menjadi “murid misionaris” yang dipanggil untuk menginjili seluruh dunia. Berbagi karunia Roh seperti itu memperkaya sinodalitas yang merupakan cara yang tepat untuk menjadi Gereja.

Keenam, sinodalitas berarti bahwa para pemimpin Gereja akan melayani umat beriman secara lebih efektif karena mengetahui lebih pasti hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan mereka. Secara efektif, sinodalitas menghubungkan para pemimpin dengan kebutuhan “dasar” dari umat yang mereka layani³³. Hal ini menunjukkan kesadaran praktis bahwa otoritas dan kepemimpinan gerejawi adalah menyangkut pelayanan dan bahwa mereka yang melayani dan yang dilayani adalah sesama peziarah dalam perjalanan yang sama³⁴. Pada titik inilah para pemimpin Gereja ditantang untuk menerjemahkan secara konkret gambaran tentang piramida terbalik yang disinggung oleh Paus Fransiskus dalam diskursusnya melalui praksis pelayanan umat Allah di mana mereka sungguh-sungguh berada ‘di bawah’ dan bukan ‘di atas’ dalam melayani kebutuhan domba-domba gembalaannya³⁵.

Ketujuh, sinodalitas berarti bahwa ada pembicaraan yang lebih jujur dan saling mendengarkan di antara anggota Umat Allah. Agar menjadi efektif, semangat dan praktik sinodalitas membutuhkan sikap saling mendengarkan di mana setiap orang memiliki sesuatu untuk disampaikan dalam semangat persaudaraan dan dilandasi kejujuran. Berbicara jujur dan saling mendengarkan adalah prinsip dialog kristiani. Hal ini melibatkan rasa saling percaya bahwa pembicara menyampaikan sesuatu dengan jujur dan pendengar mendengarkannya dengan jujur pula. Sikap saling percaya di antara umat beriman dan pemimpin Gereja sangatlah diperlukan. Umat menyampaikan secara jujur tanpa rasa takut apa yang mereka butuhkan, terutama yang rohani dan gembala Gereja mendengar dengan penuh perhatian dan menindaklanjuti hal tersebut³⁶. Seringkali, hal-hal besar dan mengejutkan terjadi ketika umat beriman berbicara jujur dan saling mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian.

Dalam *Evangelii Gaudium*, Paus Fransiskus merefleksikan secara mendalam tentang “seni mendengarkan” yang ia gambarkan sebagai keterbukaan hati yang memungkinkan kedekatan yang tanpanya perjumpaan spiritual yang sejati tidak dapat terjadi³⁷. Bapa Suci mengajak umat beriman untuk mendengarkan dengan hormat dan penuh kasih. Dalam Gereja sinodal setiap umat beriman perlu menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut dan saling mendengarkan satu sama lain dan di lain pihak, para pemimpin Gereja harus meresponsnya dengan baik. Dengan kata lain, dalam Gereja sinodal apa yang menjadi prinsip Gereja abad pertama yang dihidupi hingga saat ini - dan dikutip oleh Paus Fransiskus dalam diskursusnya – tetap dipegang teguh, yakni bahwa semua hal yang menyangkut semua orang harus dibicarakan secara bersama-sama: “*Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet*”³⁸.

Sikap mendengarkan sangat diperlukan dalam Gereja sinodal. Kaum klerus mendengarkan kaum awam dan sebaliknya dalam pertautan relasi horizontal yang bersifat resiprok dan saling

³³ Juan Scannone Carlos, “Papa Francesco e La Teologia Del Popolo,” *La Civiltà Cattolica* 165, no. 3930 (2014): 571–90.

³⁴ Christophe Pierre, “Synodality and Pope Francis: The Church That Walks Together”: 10-15.

³⁵ Ormond Rush, “Inverting the Pyramid: The ‘Sensus Fidelium’ in a Synodal Church,” *Theological Studies* 78, no. 2 (2017): 299–325.

³⁶ Renken, “Synodality: A Constitutive Element of the Church. Reflection on Pope Francis and Synodality”: 10-15.

³⁷ Papa Francesco, *Evangelii Gaudium*, n. 171 : 185.

³⁸ Orazio Condorelli, “Quod Omnes Tangit, Debet Ab Omnibus Approbari. Note sull' origine e sull' utilizzazione del principio tra Medioevo e prima eta moderna,” *Ius Canonicum* 53, n. 105 (2013): 101–127.

melengkapi atas dasar radikalitas baptisan dan partisipasi dalam imamat umum semua umat beriman³⁹. Horisan pemikiran ini mengajak kita untuk beralih dari model hubungan yang tidak setara karena superioritas dan subordinasi kepada relasi kesetaraan martabat sebagai Umat Allah⁴⁰.

Kita dapat mengatakan bahwa mendengarkan adalah hak setiap orang, tetapi menerima nasihat berdasarkan apa yang didengar adalah sebuah kewajiban yang harus diperhatikan oleh mereka yang memiliki otoritas dan kuasa dalam Gereja karena semua orang beriman dimampukan dan dipanggil oleh Allah sendiri untuk membangun Gereja dengan pelbagai karunia yang diterimanya dari Roh Kudus. Dalam Gereja sinodal, budaya konsensus bersama perlu dihidupi dan dipelihara dengan baik. Hal ini tentu saja berimplikasi pada keseriusan untuk mendefinisikan ulang pelaksanaan kuasa gerejawi dalam terang proses mendengarkan, penegasan bersama, elaborasi kritis dan dinamika komunikasi hingga tiba pada tahap pengambilan keputusan yang dipandang berguna demi kebaikan seluruh umat beriman⁴¹.

Kedelapan, sinodalitas berarti bahwa klerikalisme yang destruktif harus dihilangkan dari dalam tubuh Gereja. Semangat dan praktik sinodalitas harus diarahkan pada upaya untuk mendobrak klerikalisme yang merusak kehidupan menggereja ibarat penyakit kanker yang tumbuh perlahan dan menimbulkan rasa sakit dan luka yang berbau busuk serta dapat mengakibatkan kematian. Klerikalisme destruktif adalah superioritas palsu dan dibuat-buat dibalik selubung kuasa, prestise, pengaruh, pengetahuan dan lain sebagainya yang ditunjukkan oleh sebagian klerikus di hadapan umat beriman yang dipercayakan kepada penggembalaannya. Klerikalisme destruktif seringkali juga bersembunyi di balik kehalusan tutur kata seorang pemimpin Gereja yang merasa diri lebih baik, lebih tahu, lebih pandai daripada umat yang dilayaninya.

Klerikalisme destruktif sebagaimana dilukiskan di atas dan gaya kepemimpinan intimidatif yang sering menyertainya tidak mendapat tempat di dalam Gereja sinodal. Sinodalitas mengeluarkan klerikalisme semacam itu dengan menggarisbawahi apa yang ditegaskan oleh Paus Fransiskus bahwa bagi para murid Kristus satu-satunya otoritas adalah otoritas pelayanan dan satu-satunya kuasa adalah kuasa salib. Sinodalitas tidak dapat hidup berdampingan dengan klerikalisme destruktif, yang selalu jahat secara radikal. Kesadaran yang tercerahkan dan komitmen yang diperbarui untuk memerangi bahaya klerikalisme menuntut pertobatan pastoral yang sungguh-sungguh dari para klerus⁴².

Relevansinya untuk Konteks Indonesia

Jika dicermati secara seksama, pemikiran Paus Fransiskus terkait sinodalitas sebagaimana diuraikan di atas memiliki relevansinya untuk konteks kehidupan menggereja di Indonesia. Hemat kami, beberapa pokok pikiran di bawah ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang tentu saja tetap terbuka terhadap refleksi kritis lebih lanjut, yakni:

Pertama, menyangkut klerikalisme dalam Gereja. Secara umum, klerikalisme dapat dipahami sebagai sebuah sikap kontra produktif kaum klerus yang cenderung mengedepankan kuasa jabatan serta memelihara *status quo* dalam Gereja. Hal ini antara lain diperlihatkan melalui upaya menarik garis

³⁹ Gaudenzio Zambon, "Riconoscimento Reciproco Di Soggettività Tra Laici e Ministri Ordinati in Ordine Ad Una Forma Sinodale Di Chiesa," in *Chiesa e Sinodalità. Coscienza, Forme, Processi*, ed. Riccardo Battocchio & Serena Noceti (Milano: Glossa, 2007): 207-210.

⁴⁰ John Renken, "Synodality: Walking Together A Constitutive Element of the Church. Reflection in Preparation for a Plenary Council," *The Canonist* 9, no. 1 (2018): 70-71 .

⁴¹ Rafael Luciani, "Tempo Di Covernione, Tempo Di Riforma," *Regno-Attualita* 2 (2022): 57-64.

⁴² Papa Francesco, *Evangelii Gaudium* , n. 25, n. 30: 54, 59-60.

pisah dengan umat beriman dan memandang mereka sebagai warga Gereja ‘kelas dua’ atau bawahan yang wajib menjalankan keputusan tanpa syarat.

Sekalipun belum ada penelitian empiris tentang klerikalisme dalam Gereja katolik di Indonesia – sekurang-kurangnya sejauh yang kami ketahui –, namun kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa klerikalisme masih menjadi bagian dari persoalan yang kita alami bersama. Pengendusian atas situasi secara keseluruhan dan pelbagai keluhan yang terdengar di sana sini memperlihatkan bahwa cakar-cakar klerikalisme menggoreskan luka pada wajah keseharian hidup menggereja. Sebagian klerus cenderung bersikap otoriter-dominatif dan menggunakan pelbagai struktur internal Gereja untuk melanggengkan hubungan yang bersifat subordinatif dengan umat beriman melalui pola relasi subyek-obyek, superior-inferior, atasan-bawahan. Kehidupan menggereja sangat bersifat pastor-sentris: berpusat pada dan ditentukan oleh para klerus. Umat beriman kurang diberi ruang untuk mengungkapkan pikiran atau pendapat. Dialog berjalan timpang karena dibangun di atas dasar relasi yang tidak setara dan lebih banyak bersifat satu arah serta cenderung memaksakan kehendak. Sebagai akibatnya banyak karisma yang dimiliki umat beriman tidak mendapat ruang untuk bertumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Buntutnya bisa ditebak: partisipasi umat beriman melemah dan bahkan cenderung menjadi apatis.

Pertanyaan yang mengoda akal adalah mengapa hal seperti ini terjadi? Tanpa bermaksud untuk menyederhanakan persoalan, hemat kami, klerikalisme berhubungan erat dengan pemahaman eklesiologis yang timpang menyangkut Gereja sebagai Umat Allah. Secara implisit sebagian masih beranggapan bahwa kaum klerus adalah subjek yang berbeda dan terpisah dari Umat Allah lainnya dan bahwa umat beriman hanyalah penerima manfaat atau obyek pelayanan pastoral kaum klerus. Cara pandang yang tidak tepat ini tertanam dalam struktur-struktur dan praktik-praktik berpastoral di tengah umat beriman dan tragisnya hal ini diterima sebagai sesuatu yang wajar dan dipandang tidak dapat diubah. Selain itu, persoalan klerikalisme juga berhubungan dengan pemahaman teologis yang keliru tentang kuasa suci (*sacra potestas*) dalam Gereja dan aktualisasinya dalam kehidupan menggereja sehari-hari. Sebagian memandang kuasa bukan lagi dalam hubungannya dengan pelayanan tetapi lebih sebagai sebuah privilese khusus sebagai orang tertahbis yang menuntut ketaatan tanpa syarat dari umat beriman seluruhnya. Dengan kuasa tersebut, mereka bertindak seolah-olah sebagai pejabat sekular dan bukan sebagai pelayan rohani.

Upaya untuk mendobrak cara berpikir, sikap dan tindakan klerikalistik tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun hemat kami, apa yang paling mendesak untuk dilakukan, khususnya oleh para klerus, adalah merefleksikan kembali pesan para Bapa Konsili Vatikan II menyangkut hakekat Gereja sebagai umat Allah dan jabatan sebagai pelayanan serta penegasan Paus Fransiskus tentang menjadi Gereja yang tidak lain adalah menjadi umat Allah dan gagasan tentang piramida terbalik dalam hubungan dengan pelayanan. Pada tataran reflektif, identitas eklesial harus dibaharui kembali dalam terang hermeneutika eklesiologis yang menempatkan kaum klerus bukan sebagai subyek yang terpisah tetapi sebagai *bagian* dari umat Allah, yang dipanggil untuk melayani dan bukan untuk dilayani, yang berstatus sebagai pelayan dan bukan tuan (besar), yang memandang umat beriman sebagai rekan seperjalanan dan bukan orang asing dalam membangun persekutuan dan dalam menjalankan misi Gereja sesuai dengan kedudukan khas dan tugas masing-masing, yang mendapatkan legitimasi kuasanya ketika mereka memikul salib pelayanan dengan setia sebagaimana diamanatkan Tuhan sendiri.

Kedua, menyangkut demokratisasi dalam hidup menggereja. Sebagai prinsip dasar segala hal yang berkaitan dengan kehidupan umat beriman menuntut adanya sebuah proses yang melibatkan

semua umat. Dalam proses ini fokus perhatian diarahkan pada upaya untuk mencari kehendak Allah melalui penegasan bersama (*communal discernment*), dialog dan konsultasi. Atas dasar itu maka dalam proses ini hal yang paling penting adalah komunikasi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan bukan pada pemungutan suara terbanyak dan selanjutnya mengikuti suara mayoritas⁴³.

Kredibilitas Gereja di tengah dunia juga sangat tergantung pada upaya untuk menghidupi proses demokratisasi dalam kehidupan menggereja. Proses ini berhubungan erat dengan prinsip kolegialitas dan subsidiaritas. Kolegialitas berpijak pada kesetaraan antara semua anggota Gereja, entah kaum klerus maupun kaum awam. Dalam hubungan dengan kaum awam, prinsip kolegialitas dapat diterapkan secara konkrit pada upaya untuk melibatkan mereka dalam ruang dan struktur-struktur formal seperti dewan pastoral dan dewan keuangan, entah itu pada level parokial maupun level keuskupan. Di lain pihak, dalam hubungan dengan kaum klerus, prinsip ini mengingatkan para uskup untuk memandang para klerus sebagai pembantu dan penasihat dan karena itu harus diperlakukan sebagai saudara dan sahabat serta mendengarkan pendapat dan bahkan meminta pendapat mereka dalam proses interaksi dan dialektika dalam semangat persaudaraan. Hal ini secara formal diwujudkan melalui struktur yang memungkinkan untuk itu seperti dewan imam, dewan pastoral keuskupan, dan lain sebagainya⁴⁴. Dalam hubungan dengan prinsip subsidiaritas, secara sederhana berarti bahwa otoritas gerejawi yang berwenang membantu setiap anggota Gereja dan berbagai kelompok yang ada di dalamnya untuk semakin mandiri dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dalam menjalankan perannya, mereka perlu menghargai kemampuan, kreativitas dan kemajemukan setiap pribadi dan kelompok yang ada⁴⁵.

Dalam konteks hidup menggereja di Indonesia, iklim demokratisasi sudah mulai terasa di mana para pemimpin Gereja melibatkan umat beriman dalam proses pengambilan keputusan. Namun di lain pihak, harus diakui bahwa hal tersebut masih menjadi sebuah harapan yang pemenuhannya membutuhkan waktu yang panjang mengingat bahwa praktik kepemimpinan pada umumnya masih belum sepenuhnya mengusung semangat kolegial-partisipatif yang melibatkan semua anggota Gereja dalam pengambilan keputusan. Tantangan ke depan adalah bagaimana prinsip kesetaraan martabat, hak dan tanggungjawab umat beriman untuk terlibat dalam kehidupan menggereja diwujudkan dalam praksis yang melibatkan seluruh umat beriman, entah pria maupun wanita dalam proses pengambilan keputusan mengenai hal-hal menyangkut kehidupan bersama. Perlu juga memberikan ruang bagi keterlibatan sebanyak mungkin kaum awam wanita yang selama ini terkesan diabaikan dengan berbagai dalih serta membongkar tindakan-tindakan manipulatif bias gender yang menjadikan kehadiran mereka sekedar untuk melegitimasi keputusan yang sebelumnya sudah dirancang oleh kaum awam pria dan pemimpin umat⁴⁶. Dengan kata lain, apa yang penting untuk diperhatikan berhubungan demokratisasi dalam Gereja adalah bagaimana sikap saling menghormati, kesediaan untuk berdialog dan saling mendengarkan satu sama lain serta partisipasi dalam pengambilan keputusan demi tujuan bersama sungguh-sungguh bertumbuh dan berkembang. Secara konkrit, hal ini berarti bahwa para gembala sungguh-sungguh berusaha agar sebelum mengambil sebuah kebijakan tertentu, mereka harus mendengar suara dari 'bawah', dari umat beriman. Kalaupun dalam kasus

⁴³ John A Coleman, "Not Democracy but Democratization," in *A Democratic Catholic Church: The Reconstruction of Roman Catholicism*, ed. Eugene C. Bianchi - Rosemary Radford Ruether (New York: Crossroad, 1992) :229.

⁴⁴ Eugene Duffy, "Presbyteral Collegiality: Precedents and Horizons," *The Jurist* 69, no. 1 (2009): 116-54.

⁴⁵ Ignasius Madya Utama, "Menjadi Gereja Yang Partisipatif," in *Demokratisasi Dalam Paroki: Mungkinkah?*, ed. Andang L. Binawan (Yogyakarta: Kanisius, 2005): 32-33.

⁴⁶ Rikardus Jehaut, "Perspektif Hukum Gereja Tentang Kepemimpinan Kolegial-Partisipatif Dalam Gereja Partikular," *Alternatif* 10, no. 1 (2020): 5-10.

tertentu suara dari umat dipandang kurang tepat dan karena itu ditolak, maka harus ada alasan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan untuk itu berdasarkan kriteria penilaian menyangkut keutuhan iman dan kesucilaan, manfaat rohani dan jasmani bagi semua umat beriman dan martabat pribadi orang perorangan. Selain itu, mereka harus mempertahankan dan mengembangkan struktur-struktur sinodal yang ada dan mendorong umat beriman untuk berani menyuarakan pendapatnya berkaitan dengan kehidupan menggereja⁴⁷.

Ketiga, pembangunan masyarakat madani yang dilandasi keadilan dan persaudaraan. Jika kita mengikuti logika berpikir Paus Fransiskus dan penegasan Konsili Vatikan II, keberadaan Gereja sinodal adalah demi terwujudnya Kerajaan Allah di tengah masyarakat dan demi terwujudnya keselamatan seluruh umat manusia. Atas dasar itu maka Gereja sinodal harus menjadi Gereja yang berani keluar dari zona nyaman, dari kemapanan dirinya dan pergi ke luar bergumul dengan persoalan hidup kemanusiaan⁴⁸. Dengan kata lain, Gereja harus menjadi bagian dari masyarakat dengan mengambil bagian dalam keprihatinan masyarakat di sekitarnya dan membangun solidaritas dengan mereka, khususnya yang miskin dan tersingkir. Argumen teologis keterlibatan seperti ini bertumpu pada solidaritas keberpihakan Allah terhadap mereka yang kecil dan lemah. Beriman kepada Allah lalu berarti melibatkan diri dalam medan pergumulan hidup sehari-hari dengan segala carut marut keprihatinannya.

Tantangan Gereja sinodal ke depan adalah bagaimana mengupayakan agar keterlibatan dalam pembangunan masyarakat madani tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan reksa pastoral, khususnya dalam hubungan dengan keadilan dan persaudaraan. Pentingnya keterlibatan sosial sungguh-sungguh disadari oleh para pimpinan Gereja Katolik Indonesia. Dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) tahun 2000, mereka menyerukan secara lantang panggilan umat beriman untuk terlibat dalam pergumulan bangsa Indonesia demi mewujudkan negara yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih damai⁴⁹. Hal yang sama disuarakan kembali pada tahun 2001 dengan penekanan pada spiritualitas yang harus dihayati bukan hanya melalui doa pribadi dan doa komunitas, melainkan juga tindakan nyata untuk mencintai Allah dan sesama melalui pengembangan kesetiakawanan sosial yang terus menerus, dan dengan cara ini kita akan menggerakkan transformasi sosial, perubahan kehidupan bersama menjadi lebih manusiawi dan adil⁵⁰. Selain itu, hal penting lain yang harus diperhatikan adalah bagaimana Gereja sinodal tetap menjaga jarak kritis dengan berbagai pihak dan berani mengungkapkan, merumuskan dan menyuarakan pengalaman negatif berupa hal-hal yang tidak adil, tidak baik di tengah situasi konkret kehidupan masyarakat.⁵¹

Gereja di panggil untuk menjadi nabi yang berani menyatakan sikap yang tegas berhadapan dengan apa yang benar dan apa yang salah⁵². Hal ini penting demi menghindari Gereja terperosok ke dalam bahaya irrelevansi eksternal atau insignifikansi sosial di mana kehidupan dan dinamika internalnya terisolasi atau seolah-olah tidak memiliki persentuhan dengan dinamika sosial

⁴⁷ Adrianus Sunarko, "Gereja: Demokrasi Atau Kristokrasi?," in *Demokratisasi Dalam Paroki: Mungkinkah?*, ed. Andang L. Binawan (Yogyakarta: Kanisius, 2004): 55-56.

⁴⁸ Papa Francesco, *Evangelii Gaudium*, nn. 46-47: 73-75.

⁴⁹ Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, *Gereja Yang Mendengarkan, Memberdayakan Komunitas Basis Menuju Indonesia Baru* (Jakarta: Panitia Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, 2000): 12-13.

⁵⁰ Konferensi Waligereja Indonesia, *Pastisipasi Kita Dalam Memulihkan Marabat Manusia Dan Alam Semesta. Pesan Sidang Para Waligereja Indonesia Tahun 2001* (Jakarta: Sekretariat Keuskupan Agung Jakarta, 2001): 14-15.

⁵¹ Paul Budi Kleden, "Yang Lain Sebagai Fokus Berteologi Kontekstual Di Indonesia," *Ledalerto* 9, no. 2 (2010): 162.

⁵² Paulus Budi Kleden, "Berpijak Di Bumi - Berpihak Kepada Manusia. Mandat Dari *Gaudium et Spes*," *Jurnal Ledalero* 12, no. 1 (2013): 71-96.

kemasyarakatan. Tentu saja panggilan kenabian seperti ini merupakan panggilan semua orang beriman, termasuk para klerus. Mereka dipanggil untuk terlibat dalam perjuangan menciptakan keadilan dan persaudaraan di tengah masyarakat sambil tetap memperhatikan agar keterlibatannya tersebut tidak melewati garis-garis batas yang tidak sesuai dengan jati dirinya sebagai klerus⁵³.

Keempat, dialog antara agama. Dalam ceramahnya Paus Fransiskus menyinggung tentang implikasi ekumenis dari sinodalitas dalam hubungannya dengan Gereja Ortodoks. Dalam konteks pluralitas religius seperti di Indonesia, hal tersebut kiranya dapat dipikirkan dalam konteks yang lebih luas menyangkut hubungan dengan semua agama. Gereja sinodal ditantang untuk menjalani hidup menggereja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks kemajemukan agama.

Dalam hubungan dengan dialog, yang diharapkan dari Gereja tentu saja tidak terbatas pada ruang pemikiran dan upaya-upaya akademis untuk menumbuhkan dan mengembangkan tata kehidupan beragama yang lebih terbuka serta kondusif, melainkan menitik lebih dalam ke jantung keseharian hidup dengan membangun ‘jembatan- jembatan penyeberangan dialogal’ untuk menjumpai penganut agama lain lewat kesaksian hidup yang terpancar melalui sikap dan cara hidup yang baik, kesediaan untuk menerima, mengakui dan menghormati keberlainan penganut agama lain. Sebagai pengikut Kristus, Gereja sinodal harus membawa semangat Injil ke dalam lingkungan di mana ia hidup, entah itu berupa kehadiran, pelayanan dan kesaksian hidup maupun bekerjasama dalam bidang sosial kemanusiaan untuk tujuan pembebasan dan mendukung keadilan sosial, nilai-nilai moral dan perdamaian⁵⁴.

Bagi Gereja sinodal, dialog dengan umat beragama lain merupakan sesuatu hal yang bersifat obligatoris dan bukan merupakan sebuah pilihan fakultatif. Dalam dan melalui dialog yang jujur dalam semangat persaudaraan, Gereja diperkaya oleh pengalaman hidup umat beragama lain dan semakin diteguhkan dalam mengimani universalitas keselamatan Allah yang merangkul semua orang, apapun agama yang dipeluknya. Dialog yang sejati tentu saja menuntut sikap kerendahan hati dan menerima yang lain sebagai sesama peziarah di bumi yang berjalan menuju kepada Sang Pencipta. Hal ini menuntut keberanian untuk melucuti selubung prasangka dan rasa curiga serta merobek segala bentuk arogansi dan klaim kebenaran tanpa dasar serta fanatisme buta yang dapat mengoyahkan sendi-sendi kehidupan bersama. Pengalaman negatif di sana sini telah membuktikan hal ini. Cukup membuka mata untuk melihatnya dan menarik pelajaran dari pengalaman tersebut, sekalipun pahit rasanya.

Penutup

Sinodalitas adalah elemen konstitutif Gereja dan karena itu bukan merupakan sesuatu yang opsional. Sinodalitas merupakan amanat ilahi bagi para murid. Paus Fransiskus berulang kali merujuk pada sinodalitas dan menjelaskan bahwa sinodalitas harus menyelinap masuk ke dalam semua dimensi dan level kehidupan Gereja. Sinodalitas adalah cara bertindak Gereja yang konstan dan digerakkan oleh Roh Allah sendiri. Sinodalitas memperkaya, meningkatkan, dan menghidupkan seluruh Gereja.

Gereja tidak membutuhkan struktur baru untuk mengekspresikan sinodalitas. Sebaliknya, dengan struktur-struktur sinodalitas yang ada, Gereja ditantang untuk mengembangkan habitus berpikir baru (*novus habitus mentis*) di mana setiap anggota Umat Allah diajak untuk berbagi karunia dengan murah hati, menyuarakan kebutuhan dan keprihatinan dengan jujur dan tanpa rasa takut serta

⁵³ Rikardus Jehaut, “Antara Larangan Dan Pengecualian: Ihwal Partisipasi Aktif Imam Dalam Partai Politik Dan Dalam Jabatan Publik.,” *Jurnal Ledalero* 19, no. 2 (2020): 101–113.

⁵⁴ Piet Go (Penerj.), *Hubungan Antara Agama Dan Kepercayaan*, nn. 29-32 (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017): 16-17.

mendengarkan suara orang lain dengan penuh perhatian. Habitus berpikir baru ini menuntut pula pertobatan yang radikal untuk mengubah sistem tertentu yang barangkali telah usang dan menghalangi pertumbuhan Gereja sinodal dalam keseluruhan aspeknya.

Dalam konteks Indonesia, hal ini juga relevan untuk direfleksikan. Kita membutuhkan habitus berpikir baru sekaligus cara bertindak yang baru. Gereja sinodal haruslah juga menjadi wajah Gereja kita; sebuah Gereja yang sungguh-sungguh berjalan bersama-sama di bawah bimbingan Roh Allah sendiri dalam proses yang panjang dan terkadang meletihkan. Dan dalam proses itu tidak ada yang dikecualikan, tidak ada yang tertinggal atau ditinggalkan.

Daftar Rujukan

- Borras, Alphonse. "Soltanto Consultivo ? Sul Valore Del Consigliare Nella Chiesa." *La Rivista Del Clero Italiano* 5 (2016): 377–97.
- Brunini, Matteo. "In Cammino Verso La Sinodalità Ecclesiale Sospinti Da Papa Francesco." *Rassegna Di Teologia* 59, no. 3 (2018): 419–40.
- Carlos, Juan Scannone. "Papa Francesco e La Teologia Del Popolo." *La Civiltà Cattolica* 165, no. 3930 (2014): 571–90.
- Coleman, John A. "Not Democracy but Democratization." In *A Democratic Catholic Church: The Reconstruction of Roman Catholicism*, edited by Eugene C. Bianchi - Rosemary Radford Ruether. New York: Crossroad, 1992.
- Duffy, Eugene. "Presbyteral Collegiality: Precedents and Horizons." *The Jurist* 69, no. 1 (2009): 116–54.
- Faggioli, Mauro. "From Collegiality to Synodality: Promise and Limits of Francis's "Listening Primacy." *Irish Theological Quarterly* 85 (2020): 352–69.
- Fares, Diego. *Il Profumo Del Pastore: Il Vescovo Nelle Visione Di Papa Francesco*. Milano: Ancora Editrice, 2015.
- Fitzgibbon, Éamon. "Together on the Way - Pope Francis and Synodality." *The Furrow* 68, no. 10 (2017): 532–39.
- Francesco. *Con l'odore Delle Pecore – Incontri Con i Sacerdoti*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016.
- Francesco, Papa. "Celebrazione Dell'eucaristia per l'apertura Del Sinodo Sulla Sinodalità. Omelia Del Santo Padre Francesco." <https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2021/documents/20211010-omelia-sinodo-vescovi.html>, 2021.
- . "Discorso in Occasione Della Commemorazione Del 50.Mo Anniversario Dell'Istituzione Del Sinodo Dei Vescovi." *Acta Apostolicae Sedis* 107, no. 11 (2015): 1142.
- . *Evangelii Gaudium*. Città del Vaticano/Milano: Libreria Editrice Vaticana/Edizione San Paolo, 2013.
- Galli, Antonio Spadaro & Carlo. "La Sinodalità Nella Vita e Nella Missione Della Chiesa." *La Civiltà Cattolica* 4039, no. 4 (2018): 55–70.
- Giraud, Aldo. "I Processi Consultivi e Deliberativi Nella Chiesa." *Quaderni Di Diritto Ecclesiale* 34 (2021): 161–180.
- Go, Piet. *Hubungan Antara Agama Dan Kepercayaan*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017.
- Incitti, Giacomo. *Il Popolo Di Dio. La Struttura Giuridica Fondamentale Tra Uguaglianza e Diversità*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007.

- Indonesia, Konferensi Waligereja. *Pastisipasi Kita Dalam Memulihkan Marabat Manusia Dan Alam Semesta. Pesan Sidang Para Waligereja Indonesia Tahun 2001*. Jakarta: Sekretariat Keuskupan Agung Jakarta, 2001.
- Indonesia, Sidang Agung Gereja Katolik. *Gereja Yang Mendengarkan, Memberdayakan Komunitas Basis Menuju Indonesia Baru*. Jakarta: Panitia Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, 2000.
- Internazionale, Commissione Teologia. “La Sinodalita Nella Vita e Nella Missione Della Chiesa.” https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_it.html, 2018.
- Jehaut, Rikardus. “Antara Larangan Dan Pengecualian: Ihwal Partisipasi Aktif Imam Dalam Partai Politik Dan Dalam Jabatan Publik.” *Ledalero* 19, no. 2 (2020): 101–13.
- . “Perspektif Hukum Gereja Tentang Kepemimpinan Kolegial-Partisipatif Dalam Gereja Partikular.” *Alternatif* 10, no. 1 (2020): 5–10.
- Kleden, Paul Budi. “Yang Lain Sebagai Fokus Berteologi Kontekstual Di Indonesia.” *Ledalero* 9, no. 2 (2010): 162.
- Kleden, Paulus Budi. “Berpijak Di Bumi - Berpihak Kepada Manusia. Mandat Dari Gaudium et Spes.” *Ledalero* 12, no. 1 (2013): 71–96.
- Luciani, Rafael. “Tempo Di Coverzione, Tempo Di Riforma.” *Regno-Attualita* 2 (2022): 57–64.
- Orazio Condorelli. “Quod Omnes Tangit, Debet Ab Omnibus Approbari.” *Ius Canonicum* 53 (2013): 101–27.
- Pierre, Christophe. “Synodality and Pope Francis: The Church That Walks Together.” *The Jurist* 77 (2021): 3–23.
- Porreca, Agostino. “La Teologia Del Popolo Radici Teologiche Di Papa Francesco.” *Rassegna Di Teologia* 61, no. 2 (2020): 349–51.
- Ratzinger, Joseph. “Democratizzazione Della Chiesa?” In *Democrazia Nella Chiesa. Possibilità e Limiti*, edited by Hans Ratzinger, Joseph & Maier, 51. Brescia: Queriniana, 2005.
- Renken, John. “Synodality: A Constitutive Element of the Church. Reflection on Pope Francis and Synodality.” *Studia Canonica* 52, no. 1 (2018): 5–44.
- . “Synodality: Walking Together A Constitutive Element of the Church. Reflection in Preparation for a Plenary Council.” *The Canonist* 9, no. 1 (2018).
- Rush, Ormond. “Inverting the Pyramid: The ‘Sensus Fidelium’ in a Synodal Church.” *Theological Studies* 78, no. 2 (2017): 299–325.
- Spadaro, Antonio. “Intervista a Papa Francesco.” *La Civiltà Cattolica* 164, no. 3 (2013): 459.
- Sunarko, Adrianus. “Gereja: Demokrasi Atau Kristokrasi?” In *Demokratisasi Dalam Paroki: Mungkinkah?*, edited by Andang L. Binawan, 43–60. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Utama, Ignasius Madya. “Menjadi Gereja Yang Partisipatif.” In *Demokratisasi Dalam Paroki: Mungkinkah?*, edited by Andang L. Binawan. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Vitale, Dario. “Sacerdozio Comune e Sacerdozio Ministeriale o Gerarchico. Rilettura Di Una Questione Controversa.” *Rassegna Di Teologia* 52, no. 1 (2011): 48.
- Weekly, Belgian Catholic. “Interview with the Holy Father Francis for the Belgian Catholic Weekly, ‘Tertio’,.” *Tertio*, 2016. <https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/12/07/161207a.html>.
- Zambon, Gaudenzio. “Riconoscimento Reciproco Di Soggettività Tra Laici e Ministri Ordinati in Ordine Ad Una Forma Sinodale Di Chiesa.” In *Chiesa e Sinodalità. Coscienza, Forme, Processi*, edited by Riccardo Battocchio & Serena Noceti, 207. Milano: Glossa, 2007.